

**KEBIJAKAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DI BANYUMAS**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam**

**OLEH :
UMI HANIFAH GOZALI
NIM. 1223303035**

**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**

5

**KEBIJAKAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BANYUMAS DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
PONDOK PESANTREN DI BANYUMAS**

Umi Hanifah Gozali

NIM. 1223303035

ABSTRAK

Sumber daya manusia yang bermutu merupakan faktor penting dalam pembangunan bangsa, dan SDM yang bermutu hanya diwujudkan dengan pendidikan yang bermutu. Menurut Direktorat Jendral Pendidikan Islam kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai proses peningkatan kualitas SDM menuntut adanya diversifikasi layanan pendidikan, mengingat luas dan heterogenya cakupan sasaran pendidikan..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kementerian agama kabupaten banyumas dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren dengan mengadakan program kesetaraan jenjang pendidikan dimana salah satunya melalui strategi yang digunakan kementerian agama kabupaten banyumas dengan cara menyingkronkan teori menurut yaitu perubahan terus menerus, menentukan standar mutu, perubahan kultur, perubahan organisasi dan memperthankan hubungan dengan pelanggan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian ini dalam penyajian datanya menggambarkan objek penelitian yaitu kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren. Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi terhadap kepala seksi PD Pontren Kemenag Banyumas serta Seksi Pontren Kemenag Banyumas serta beberapa pondok pesantren penyelenggara program pendidikan kesetaraan mulai dari 26 Oktober 2015 s/d 26 Juli 2016. Dalam menganalisis data penelitian ini digunakan untuk menggambarkan data-data mengenai kebijakan kemenag Banyummas. Proses analisis meliputi reduksi data yaitu merangkum, memilih, memfokuskan serta dicari tema dan dengan membuang data yang tidak perlu lalu data disajikan dengan menguraikan konsep yang berhubungan dengan kebijakan strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren.

Hasil dari penelitian ini adalah penggambaran kebijakan strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren dengan mengimplementasikan strategi peningkatan mutu dalam buku Edward Sallis

Kata Kunci: Kebijakan Strategi, Mutu Pendidikan Pondok Pesantren

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Sudah merupakan pendapat umum bahwa kemakmuran suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas atau mutu pendidikan bangsa yang bersangkutan. Bahkan lebih spesifik lagi, bangsa-bangsa yang berhasil mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dewasa ini adalah bangsa-bangsa yang melaksanakan pembangunan berdasarkan strategi pengembangan sumber daya insani. Artinya, melaksanakan pembangunan nasional dengan menekankan pada pembangunan pendidikan guna pengembangan sumberdaya manusia, dari aspek pendidikan berarti mengembangkan pendidikan baik aspek kuantitas maupun kualitas. Aspek kuantitas menekankan pada perluasan sekolah sehingga penduduk memiliki akses untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Dari aspek kualitas, pengembangan sumber daya manusia berarti pendidikan dalam hal ini kualitas sekolah memiliki tekanan bahwa lulusan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki kemampuan yang relevan dan diperlukan dalam kehidupannya.

Peningkatan mutu pendidikan melalui standarisasi dan profesionalisasi yang sedang dilakukan dewasa ini menuntut pemahaman berbagai pihak terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai komponen sistem pendidikan. Perubahan kebijakan pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah menekankan bahwa pengambilan kebijakan berpindah dari pemerintah pusat (*top government*) ke pemerintahan daerah (*district government*), yang berpusat di pemerintahan kota dan kabupaten. Dengan demikian, kewenangan-kewenangan penyelenggaraan

pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah berada di pundak Pemerintah Kota dan Kabupaten, sehingga implementasinya akan diwarnai oleh *political will* pemerintah daerah, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hal ini, tentu saja yang paling menentukan adalah Bupati/Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya. Oleh karena itu, merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu/kualitas pendidikan di daerahnya, meskipun tidak selamanya demikian, karena dalam pelaksanaannya tidak sedikit penyimpangan dan salah penafsiran terhadap kebijakan yang digulirkan, sehingga menimbulkan berbagai kerancuan bahkan penurunan kualitas.¹

Islam merupakan salah satu agama *samawi* yang dibawa oleh Muhammad saw. untuk disampaikan dan diajarkan kepada seluruh umat manusia. Dalam doktrin ajaran Islam yang *syamil* (komprehensif) menjelaskan semua aspek baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat ataupun segala sesuatu yang akan dikerjakan oleh manusia untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk melakukan pekerjaan harus terencana, terstruktur dan terarah, sebagai pengejawantahan nilai-nilai Islam. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sesuatu yang akan dikerjakan haruslah terprogram tidak boleh asal-asalan. Oleh sebab itu Islam memberikan tatanan “nilai pengelolaan” mulai dari urusan yang terkecil sampai yang terbesar, mulai dari mengurus diri sendiri (keluarga) hingga mengurus masyarakat, mulai dari mengurus kehidupan rumah tangga sampai dengan mengurus negara dalam bingkai sebuah

¹Sri Wahyuni, “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis madrasah”, <http://sriwahyunicoy.blogspot.co.id>, diakses 5 Juli 2016, pukul 09.46.

manajemen agar tujuan yang hendak dicapai melalui visi dan misi bisa diraih dan bisa selesai secara efisien dan efektif.

Tujuan pertama reformasi pendidikan adalah membangun suatu sistem pendidikan nasional yang lebih baik, lebih mantap, dan lebih maju dengan mengoptimalkan dan memberdayakan semua potensi dan partisipasi masyarakat. Sebab pendidikan merupakan struktur pokok yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk bisa menentukan barang dan jasa apa yang diperlukan.² Bahkan secara makro, pendidikan merupakan “jantung” sekaligus “tulang punggung” masa depan bangsa dan negara,³ bahkan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam memperbaiki dan memperbarui sektor pendidikan.⁴ Sedangkan disisi yang lain, sistem pendidikan Islam merupakan suatu kawah candradimuka pembentuk manusia sempurna sebagai fondasi awal dalam pembangunan peradaban madani,⁵ dan mewujudkan rahmat bagi seluruh umat manusia.⁶ Dengan demikian, pendidikan tersebut dilakukan manusia dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan taraf hidupnya, melalui proses pendidikan

² Zamroni, *Dinamika Peningkatan Mutu*, (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011), Hlm. 83.

³Zian Farodis, *Panduan Manajemen Pendidikan Ala Harvard University*, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), Hlm. 7.

⁴ Aulia Reza Bastian, *Reformasi Pendidikan: Langkah-Langkah Pembaharuan Dan Pemberdayaan Pendidikan Dalam Rangka Desentralisasi Sitem Pendidikan Indonesia*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2002) Hlm. 24.

⁵ Sukarno, *Budaya Politik Pesantren Perspektif Internasionalisme Simbolik*, (Yogyakarta: Interpena, 2012), Hlm. 15.

⁶ Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 44.

diharapkan manusia menjadi cerdas atau memiliki kemampuan, yang biasa dikenal dengan istilah *skill* dalam menjalani kehidupannya.⁷

Problema pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, tanpa terkecuali pendidikan Islam di antaranya adalah:

- 1) Masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan
- 2) Masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan
- 3) Masih lemahnya manajemen pendidikan

Disamping belum terwujudnya keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan akademisi dan kemandirian. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan lebih khusus pendidikan Islam, misalnya pergantian kurikulum nasional dan lokal dari kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013, namun dengan melalui pergantian kurikulum ini bukannya menyelesaikan permasalahan pendidikan tapi justru malah menambah permasalahan baru dalam pendidikan di negeri ini. Usaha selanjutnya dalam mengatasi problema pendidikan yaitu peningkatan kompetensi dan konvensasi guru melalui pelatihan dan sertifikasi, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah.

Terlebih dalam pengelolaan pendidikan Islam yang merupakan salah satu segi penopang kehidupan yang urgen untuk membangun peradaban dan

⁷ Jerry H. Makawimbang, *Supervisi Dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), Hlm. 1.

menjadikan manusia yang lebih baik dan berkarakter serta penuh dengan “keridhaan” Tuhan. Pengelolaan pendidikan Islam yang professional dan bermutu bukan merupakan hal yang mudah bagi seseorang atau lembaga pendidikan di negara ini.

Dunia pendidikan Islam merupakan tempat yang penuh dengan lika-liku permasalahan yang secara substansial bisa dikatakan sebagai cawah candradimuka pemeas waktu, tenaga, biaya dan pikiran dalam membentuk manusia yang paripurna. Oleh sebab itu, yang paling inti di dalamnya adalah pola manajemen pengembangan kelembagaan dan kependidikan yang akan menjadi barometer keberhasilan pendidikan Islam itu sendiri dalam peningkatan mutunya.⁸

Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan Islam belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian mutu pendidikan Islam di negeri ini, terutama di pulau Jawa, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup signifikan dan menggembirakan, namun sebagian mutu pendidikan Islam lainnya yang berada di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua serta daerah lainnya masih memprihatinkan. Secara fungsional, pendidikan Islam pada dasarnya ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan manusia seutuhnya (insan kamil) yakni manusia berkualitas sesuai dengan pandangan Islam.⁹

Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Islam untuk melahirkan manusia-manusia unggul (insan kamil) dengan berpegang teguh kepada al-Qur'an

⁸ Siti Muriah, *Kata Pengantar Dalam Manajemen Pendidikan Islam; Konstruksi Teoritis Dan Praktis*, (Malang & Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2012).

⁹ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam; Paradigma Humanisme Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. II, Hlm. 32.

dan Sunnah (selain nalar juga wahyu)¹⁰ merupakan suatu bentuk kemutlakan pada ranah teoritis-normatif maupun aplikatif-normatif. Artinya, al-Qur'an merupakan nilai normatif yang "harus" dijadikan sebagai kerangka yang bermuara pada pandangan hidup, sikap hidup, dan tujuan hidup yang semuanya harus bernapaskan Islam dan dijiwai oleh ajaran-ajaran yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah.

Pasca UUSPN nomor 20 tahun 2003 maupun PP 55 tahun 2007, Lembaga Pendidikan Islam (Pondok Pesantren, Madin dan TPQ) nampaknya masih belum mampu memacu ketertinggalannya dalam pengelolaan sistem pendidikan. Lembaga Pendidikan Islam masih dipandang sebagai lembaga kelas kedua (*second Class*) setelah Lembaga pendidikan umum. *Image* Lembaga Pendidikan Islam adalah sekolah yang "kurang" bermutu, berkualitas dan lulusannya kurang mempunyai daya saing. Secara nasional tingkat favoritas masyarakat kita terhadap Lembaga Pendidikan Islam lebih rendah dibanding lembaga pendidikan pada umumnya. Berikut beberapa permasalahan yang menimbulkan dampak negatif (kurang bermutu) atas lembaga pendidikan islam:

1. Problem manajemen pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam.
2. Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Islam.
3. Problem sumberdaya Lembaga Pendidikan Islam,
4. Problem pendanaan

¹⁰ Abd. Racman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam; Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 2.

5. Mutu output, ini sesungguhnya merupakan akumulasi dari berbagai problem yang dihadapi Lembaga Pendidikan Islam¹¹

Berdasarkan data Human Development Index Report 1999, melaporkan bahwa pembangunan pendidikan Islam di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain. Bahkan dibandingkan dengan negar-negara di Asia Tenggara, kita diurutan 105, jauh dibawah Singapura (22), Brunai (25), Malaysia (56), Thailand (67), dan Srilangka (90). Sedangkan penelitian tahun 2000, peringkat mutu pendidikan Indonesia menurun menjadi urutan ke 109. Hasil penelitian PBB (UNDP) tahun 2000 menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia menduduki urutan ke- 109 dari 174 negara yang diteliti. Bahkan pada tahun 2009, Indonesi pun masih menduduki urutan ke-111 dari 182 negara, atau sangat jauh dibandingkan dengan negara tetangga.¹²

IAIN PURWOKERTO

Dari deskripsi tersebut disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam tertinggal jauh dibanding negara yang lainnya. Tentunya di dalamnya termasuk pula pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius pada lembaga pendidikan Islam formal, maupun non formal untuk memainkan peran signifikan pada arah pengelolaanya.

UUD 1945 adalah dasar negara sebagai sumber hukum. Oleh karena itu UUD 1945 juga menjadi sumber hukum bagi segala aktivitas bagi warga negaranya, terutama dibidang pendidikan. Dalam pembukaan Undang-Undang

¹¹ Arsip Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tentang Kebijakan Kementerian Agama PD Pontren tahun 2015

¹² Ilhamidi, "Manajemen Mutu Dalam Pendidikan Islam", <http://ilhamidisintang.blogspot.co.id>, Diakses, 25 Mei 2016, pk. 13.25 WIB.

Dasar 1945 alinea ke empat bahwa “pemerintah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”¹³ Seperti yang di sebutkan dalam pembukaan UUD 1945, bahwasanya salah satu tujuan Nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimana hal tersebut menjadi salah satu dasar dalam menyelenggarakan suatu pendidikan bagi masyarakat.

Seiring dengan lajunya arus globalisasi, informasi dan pasar bebas tuntutan reformasi perlu diupayakan kecerdasan masyarakat lewat jalur pendidikan secara optimal dan terprogram oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa yang lebih khusus dijelaskan pada UUD 1945 Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat 1, bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.¹⁴ Dengan dasar itulah perlunya mutu pendidikan di semua jenjang sekolah, agar masyarakat bisa menimbangi kemajuan dan tuntutan zaman dalam kehidupan yang lebih layak, mandiri dan tidak menjadi beban pemerintah/negara. Sebagai konsekuensinya Pemerintah Penyelenggara Negara dalam usaha mencerdaskan bangsa di tempuh lewat Departemen Pendidikan. Sedangkan sebagai langkah pelaksanaan dibebankan kepada Lembaga Pendidikan mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi dan dialokasikan Dana, Sarana dan Prasarana.

Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenag RI, dahulu Departemen Agama Republik Indonesia, disingkat Depag RI) adalah kementerian

¹³ Anonim, UUD RI, *Hasil Amndemen Ke-VI* (Surabaya : Al Hikmah, 2002), hlm. 2.

¹⁴ Anonim, UUD 1945 bab XIII tentan *Pendidikan Dan Kebudayaan* pasal 31 ayat 1.

dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag). Dimana setiap kabupaten saat ini mempunyai kementerian agama dengan visi, misi, serta fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing daerah. Berdasarkan Undang – undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV bagian ke keempat pasal 10 tentang Hak dan Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, bahwa: “Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁵ Dengan begitu Kementerian Agama Kabupaten Banyumas termasuk dalam lingkup tersebut, dimana Pondok Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama berhak mendapatkan pengarahan, bimbingan, bantuan serta pengawasan dari Kementerian Agama. Salah satunya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Mutu mempunyai makna ukuran, kadar, ketentuan dan penilaian tentang kualitas sesuatu barang maupun jasa (produk) yang mempunyai sifat absolut dan relatif. Dalam pengertian yang absolut, mutu merupakan standar yang tinggi dan tidak dapat diungguli. Biasanya disebut dengan istilah baik, unggul, cantik, bagus, mahal, mewah dan sebagainya.¹⁶ Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep mutu pendidikan adalah elit, karena hanya sedikit institusi yang dapat memberikan pengalaman pendidikan dengan mutu tinggi kepada anak didik.

¹⁵ Anonim, Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV bagian ke keempat pasal 10 tentang “Hak dan Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah.

¹⁶ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, terj. Ahmad Ali Riadi & Fahrurozi, (Yogyakarta: Ircisod, 2012), hlm. 52

Dalam pengertian relatif, mutu memiliki dua pengertian. Pertama, menyesuaikan diri dengan spesifikasi. Kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan.¹⁷

Menurut KMA No 373 Tahun 2002 tentang Struktur Dan Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota Menteri Agama Republik Indonesia, BAB I Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 35, bahwa “Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan keagamaan dan pondok pesantren”.¹⁸ Dengan begitu, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas selaku Departemen Kabupaten, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarakat di bidang pendidikan keagamaan dan pondok pesantren dilaksanakan melalui Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Seksi Pekapontren).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 10 sampai 13 November 2015 di Kementrian Agama Kabupaten Banyumas, diperoleh informasi bahwa Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren adalah pelaksana Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Banyumas dalam bidang Lembaga Keagamaan dan Pondok Pesantren berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama dan Perundang-undangan. Dimana Seksi Pekapontren mempunyai tugas pokok yakni: “Melakukan Pelayanan dan Bimbingan di bidang Pendidikan Keagamaan,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 54

¹⁸ KMA No 373 Tahun 2002 tentang Struktur Dan Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Dan Kantor Departemen Kabupaten / Kota Mentri Agama Republik Indonesia, BAB I Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 35.

Pendidikan Diniyah, Pendidikan Salafiyah Kerjasama Kelembagaan dan Pengembangan Pondok Pesantren, Pengembangan Santri dan Pelayanan Pondok Pesantren pada masyarakat”. Serta Seksi Pekapontren memiliki visi “Melakukan Pelayanan dan Bimbingan di bidang Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Diniyah, Pendidikan Salafiyah Kerjasama Kelembagaan dan Pengembangan Pondok Pesantren, Pengembangan Santri dan Pelayanan Pondok Pesantren pada masyarakat”. Dimana dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan di pondok pesantren dengan cara mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sekiranya dapat menjadi strategi pondok pesantren untuk dapat meningkatkan mutu pendidikannya.¹⁹

Berdasarkan deskripsi yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Banyumas.

B. Definisi Operasional

Depinisi operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam judul penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian tersebut. Berikut paparan depinisi operasional dari judul skripsi yang penulis bahas.

1. Kebijakan

¹⁹ Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Seksi Pekapontren, Dokumentasi Hasil Observasi Penulis, Tgl. 10-13 November 2015.

Di dalam bukunya, Edi Suharto menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.²⁰

Jadi kebijakan yang dimaksud penulis di sini merupakan suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.

2. Peningkatan Mutu Pendidikan

Sumayang menyatakan quality (mutu) adalah tingkatan dimana rancangan spesifikasi sebuah produk, barang, dan jasa sesuai dengan fungsi dan penggunaannya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa mutu (quality) adalah sebuah filosofi dan metodologis tentang (ukuran) dan tingkat baik buruk suatu benda, yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda rancangan spesifikasi sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan fungsi dan penggunaannya agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan.²¹

Dalam pandangan Zamroni dikatakan bahwa peningkatan mutu sekolah adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.²²

²⁰ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 7.

²¹ Lalu Sumayang, *Manajemen dan Organisasi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2003), 322.

²² Zamroni, *Meningkatkan Mutu Sekolah*, (Jakarta : PSAP Muhammadiyah, 2007), hlm. 2.

Maka peningkatan mutu pendidikan dalam skripsi ini dapat diartikan sebagai sebuah proses dalam membenahi dan mengembangkan berbagai program pendidikan dengan melihat indikator mutu pendidikan yang telah ditetapkan agar dapat memuaskan pelanggan yakni masyarakat serta dapat menghasilkan output yang berguna di tengah masyarakat.

3. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam karena merupakan lembaga yang berupaya menanamkan nilai-nilai Islam di dalam diri santri.²³

Berdasarkan pengertian di atas, maksud pondok pesantren dalam skripsi ini adalah lembaga pendidikan yang berupaya menanamkan nilai-nilai Islam di dalam diri santri di lingkup kabupaten Banyumas.

Jadi berdasarkan uraian deskripsi definisi operasional di atas, maka dalam skripsi yang penulis buat, penulis akan menyajikan data-data yang menggambarkan upaya yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas melalui kebijakannya untuk meningkatkan mutu pendidikan Pondok Pesantren di Kabupaten Banyumas yaitu dengan menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Bagaimana Kebijakan Strategi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Dalam**

²³ Abd. Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren Studi Transformasi Kepemimpinan Kyai dan Sistem Pendidikan Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), hlm. 33.

Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren Di Kabupaten Banyumas”?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan mutu pendidikan Pondok Pesantren di Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut ialah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan *study* lanjutan dan bahan kajian terhadap kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Pondok Pesantren.

b. Manfaa Praktis

- 1) Penelitian ini bermanfaat bagi penulis agar menjadi motivasi untuk terus meningkatkan semangat di dalam mencari dan mengembangkan keilmuannya.
- 2) Bagi pihak Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dan menjadikan bahan pertimbangan untuk membantu pemecahan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.²⁴ Adapun objek dalam skripsi yang penulis teliti adalah kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren.

Penulis juga telah melakukan kajian pustaka terhadap skripsi mahasiswa IAIN Purwokerto yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh saudara Mukhtar (2005) dengan judul “Upaya Peningkatan Mutu Pesantren (Study Kasus di Pondok Pesantren Attaujeh Al Islamy Leler Banyumas)” dalam skripsi ini fokus dalam upaya peningkatan mutu pesantren, dimana menurutnya lulusan pesantren harus mempunyai pengetahuan umum dan skill yang bermutu agar lulusan pesantren mampu bersaing dengan dunia kerja. Metodologi penelitian skripsi ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, fungsi keabsahan data.²⁵

Skripsi saudara Nopita Rahayu²⁶ (2013) yang berjudul “Upaya Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan di SMP Ma’arif Nu 1 Bumiayu Tahun Pelajaran 2013/2014. Dimana skripsi ini memfokuskan penelitian pada segi objek, subjek maupun lokasi. Penulis menekankan pada aktivitas atau kegiatan yang meliputi: perencanaan, perekrutan, seleksi, penetapan, pembinaan dan pengembangan, promosi dan mutasi, pemutusan hubungan kerja, kompetensi, dan penilaian prestasi kerja di SMP Ma’arif NU 1 Bumiayu. Metodologi penelitian skripsi ini

²⁴ Tim Penyusun, *Penduan Penulisan Skripsi; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*, (Purwokerto: STAIN PRESS, 2012), hlm. 6.

²⁵ Mukhtar, “*Upaya Peningkatan Mutu Pesantren (Study Kasus Di Pondok Pesantren Attaujeh Al Islamy Leler Banyumas)*”, dikutip 25 Oktober 2015, pkl. 13.42

²⁶ Nopita Rahayu, “*Upaya Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Di SMP Ma’arif Nu 1 Bumiayu Tahun Pelajaran 2013/2014*”, dikutip 25 Oktober 2015, pkl. 13 50

meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, fungsi keabsahan data.

Skripsi saudara Arifin (2005) yang berjudul “Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Pesantren Mamba’ul Ushulil Hikmah Linggasari Kembaran Banyumas”. Dimana skripsi ini menitik beratkan tentang upaya peningkatan mutu di pesantren yang menyelenggarakan pendidikan berbasis agama dan pendidikan yang berbasis pada peningkatan skill. Metodologi penelitian skripsi ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, fungsi keabsahan data.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul “Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Kabupaten Banyumas”. Disini penulis akan menekankan pada kebijakan Kementerian Agama sebagai Departemen Kabupaten dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan Pondok Pesantren dimana salah satunya yaitu dengan menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren di kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan pokok permasalahan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

²⁷ Arifin, “*Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Pesantren Mamba’ul Ushulil Hikmah Linggasari Kembaran Banyumas*”, dikutip 25 Oktober 2015, pkl. 14.00

Pada awal bagian meliputi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab ke dua yang merupakan landasan teori yang berisi landasan teori yang terdiri dari: bagian pertama tentang kebijakan kementerian agama yang meliputi: pengertian kebijakan dan Kementerian Agama, fungsi kebijakan. Bagian kedua tentang mutu pendidikan yang meliputi: pengertian mutu, strategi peningkatan mutu, konsep peningkatan mutu dan kebijakan program peningkatan mutu. Bagian ketiga tentang pondok pesantren yang meliputi: pengertian pondok pesantren, pendidikan di pondok pesantren.

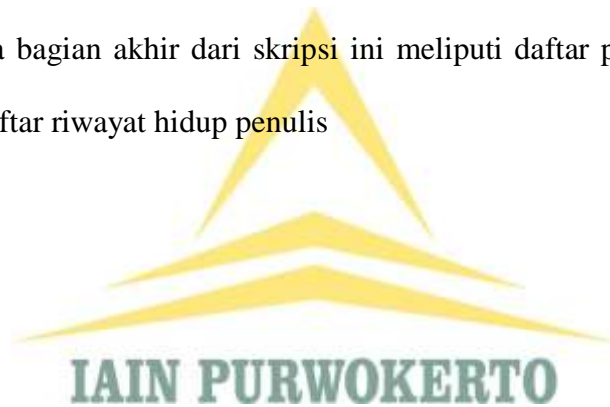
Bab ke tiga adalah metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab ke empat adalah penyajian data dan analisis data yang terdiri dari: bagian pertama tentang gambaran umum kementerian agama Kabupaten Banyumas yang meliputi: sejarah kemenag kab. Banyumas, letak kemenag kab. Banyumas, visi dan misi kemenag kab. Banyumas, struktur organisasi kemenag kab. Banyumas. Bagian kedua tentang penyajian data mengenai gambaran kebijakan strategi kemenag kab. Banyumas dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren di Banyumas yang meliputi: gambaran umum kebijakan strategi kemenag kab. Banyumas, arah kebijakan teknis peningkatan

mutu kemenag kab. Banyumas, strategi peningkatan mutu pendidikan pondok pesantren Kementerian Agama kabupaten Banyumas, langkah strategi kemenag kab. Banyumas dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren, Hambatan Implementasi kebijakan strategi Kemenag Kab. Banyumas. Bagian ketiga tentang analisis data penelitian

Bab ke lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Dan pada bagian akhir dari skripsi ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian tentang kebijakan strategi kementerian agama dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren di Banyumas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren adalah pelaksana Tugas Pokok dan Fungsi kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten dalam bidang Lembaga Keagamaan dan Pondok Pesantren berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama dan Perundang-undangan yang berlaku. Seksi Pekapontren memberikan Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Pendidikan Keagamaan, Madrasah Diniyah, Pendidikan Salafiyah, Kerjasama Kelembagaan dan Pondok Pesantren serta Pengembangan Santri.

Kebijakan Strategi yang dimplementasikan kementerian agama kabupaten Banyumas merupakan implementasi dari strategi peningkatan mutu dalam buku Edwardsalais yang berjudul Total Quaity Management dimana strategi peningkatan mutu terdiri dari: pertama perbaikan terusmenerus dengan memperbanyak kesempatan dan bantuan beasiswa bagi para pendidik agar para pendidik dapat terus meningkatkan kinerjanya, menentukan standar mutu dengan memperkuat forum atau wahana peningkatan mutu pendidik yaitu dengan membentuk forum kerjasama pondok pesantren tingkat kabupaten banyumas untuk meningkatkan komunikasi penguatan pelebagaan dan peningkatan mutu pendidikan di pondok pesantren , ketiga perubahan kultur Mengembangkan

benchmarking terhadap pendidikan berstandar nasional dengan mendorong kepada pondok pesantren untuk melaksanakan komparasi study banding dengan lembaga pendidikan keagamaan yang kualitasnya sudah bagus, perubahan organisasi yaitu mengembangkan prototype satuan pendidikan unggul dengan mendorong pada lembaga pendidikan keagamaan untuk menjadi lembaga pendidikan yang bisa menjadi acuan bagi lembaga pendidikan yang lain, dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan yaitu mendorong partisipasi siswa dalam musabaqoh atau kejuaraan diniyah dengan memberikan motivasi kongkrit terhadap santri pondok pesantren, madin, TPQ untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kompetitif di kementerian maupun ditingkat lokal dalam bidang keagamaan.

Dengan kebijakan strategi tersebut diharapkan mutu pendidikan di pondok pesantren kabupaten banyumas dapat meningkat serta mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain dan tidak menjadi pilihan kedua lagi, karena pondok pesantren merupakan pusat ilmu dimana terdapat norma-norma keagamaan dan keilmuan yang beraneka ragam untuk dapat meningkatkan kemampuan. Dalam pendidikannya pula pondok pesantren dapat mengimbangi alur perkembangan dunia pendidikan umum sehingga tujuan adanya lembaga pendidikan agama dapat tercapai dan memenuhi kebutuhan semua pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil-hasil penelitian ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Wilayah kerja Seksi Pekapontren cukup luas dengan karakteristik Lembaga yang unik dan heterogen, oleh karena itu sangat dibutuhkan sarana koordinasi dan verifikasi seperti kendaraan bagi petugas lapangan.
2. Seksi Pekapontren melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan lebih dari 1000 lembaga terdiri dari Diniyah Takmiliyah Awaliyah, Wustho dan Ulya Pondok Pesantren, Penyelenggara Pendidikan Salafiyah/Paket dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) oleh karena itu dibutuhkan sarana dan prasarana kerja yang representatif.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang penulis nantikan syafa'atnya.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun “tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna” termasuk penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Abidin, Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas, 2006.
- Achmadi. *Ideologi Pendidikan Islam; Paradigma Humanisme Teosentris, Cet. II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Afif, Faisal. *Strategi Pemasaran*. Bandung: Angkasa. 1984.
- Ali, Attabik. *Kamus Inggris-Indonesia-Arab*. Yogyakarta: Mukti Karya Grafika, 2003.
- Anonim. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV bagian ke keempat pasal 10 tentang “Hak dan Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah.
- Anonim. UUD 1945 bab XIII tentan *Pendidikan Dan Kebudayaan* pasal 31 ayat 1.
- Anonim. UUD RI Hasil Amndemen Ke-VI. Surabaya : Al Hikmah, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Assegaf, Abd. Racman Assegaf. *Filsafat Pendidikan Islam; Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Depdiknas. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Lok.Cit
- Depnaker. *Peningkatan Mutu Terpadu*. 1986.
- Dhofier, Zamakhasyari. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3S, 1983.
- Ellyasin, Muhammad, dan Nurhayati, Nanik. *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Aditya Media Publshing, 2012.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Firodis, Zian. *Panduan Manajemen Pendidikan Ala Harvard University*. Yogyakarta: Diva Press, 2011.
- H., Makawambang, Jerry. *Supervisi Dan Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta, 2011.

- Hadi, Amirul, dan Haryono. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Ilhamidi. "Manajemen Mutu Dalam Pendidikan Islam". <http://ilhamidisintang.blogspot.co.id>. diakses 25 Mei 2016, pkl. 13.25 WIB
- Jalal, Faisal, dan Supriyadi, Dedi. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah, Cet-1*. Yogyakarta: Adicita Jaya Karya Sentosa Nusa 2001.
- Kementrian Agama Kabupaten Banyumas Seksi Pekapontrent, Dokumen Hasil Observasi dan wawancara penulis, Tgl. 26 Oktober 2015-25 Juli 2016.
- KMA No 373 Tahun 2002 tentang Struktur Dan Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Dan Kantor Departemen Kabupaten / Kota Menti Agama Republik Indonesia, BAB I Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 35.
- Komariah, Aan, dan Triatna, Cepi. *Visionary Leadership: Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Madjid, Nurcholis. *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta:Paramadina, 1997.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Masykur, Anis Masykhur. *Menakar Modernisasi Pendidikan Pesantren; Mengusung Sistem Pesantren Sebagai Sistem Pendidikan Mandiri*. Kalimantan: Barnea Pustaka, 2010.
- Muriah, Siti. *Kata Pengantar Dalam Manajemen Pendidikan Islam; Konstruksi Teoritis Dan Praktis*. Malang & Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2012.
- N., Dunn, William. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- N., Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Nata, Abudin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Pongtuluran, Aris. *Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan Manajerial*. Jakarta: LPMP, 1995.
- Prasodjo, Sudjono. *Profil Pesantren*. Jakarta: LP3S, 1982.
- Prianto, Pius, dan Albari, Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 2001.

- Reza, Bastian, Aulia. *Reformasi Pendidikan: Langkah-Langkah Pembaharuan Dan Pemberdayaan Pendidikan Dalam Rangka Desentralisasi Sitem Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2002.
- S., Arco, Jerome. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sallis, Edward. *Total Quality Management in Education, Ter. Ahmad Ali Riadi dan Fahrurozi*. Yogyakarta: Ircisod, 2012.
- Sirozi, Muhammad. *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia; Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No.2/1989*. Jakarta: INIS,2004.
- Soebahar, Abd. Halim. *Modernisasi Pesantren Studi Transformasi Kepemimpinan Kyai dan Sistem Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: LKIS, 2013.
- Sri Wahyuni, “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis madrasah”, <http://sriwahyunicoy.blogspot.co.id>, diakses 5 Juli 2016, pukul 09.46.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Subbhan, M., dan Khusnuridlo, Moh. *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global. Cet-1*. Yogyakarta: LaksBang PREESindo, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sukarno. *Budaya Politik Pesantren Perspektif Internasionalisme Simbolik*. Yogyakarta: Interpena, 2012.
- Sumayang, Lalu. *Manajemen dan Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat, 2003.
- Syafaruddin. *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Cet. Ke-2* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.951
- Tim Penyusun, *Penduan Penulisan Skripsi; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*, (Purwpkerto: STAIN PRESS, 2012), hlm. 6.
- Zamroni. *Dinamika Peningkatan Mutu*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011.
- Zamroni. *Meningkatkan Mutu Sekolah*. Jakarta : PSAP Muhamadiyah, 2007.